

## KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI KONFRONTATIF INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Metrahultikultura<sup>1</sup>, Reyhan Ainun Yafi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>MAN 1 Boyolali, Indonesia

<sup>2</sup>SMAN 1 Rasau Jaya, Indonesia

Email: <sup>1</sup>metrahultikultura.2021@student.uny.ac.id, <sup>2</sup>reyainunyafi@gmail.com

**Abstract.** *This research examines Indonesia's foreign policy during the Guided Democracy period. Indonesia's foreign policy at that time was confrontational. This article aims to analyze whether Indonesia's foreign policy during the Guided Democracy period was a factor in the use of power in conducting international relations. The method used in this research is library research with a realism approach. The data sources used were books on the theory of realism in international relations, documents from the Indonesian foreign ministry and articles and journals related to Indonesia's foreign policy during the Guided Democracy period. The results of the study show that the direction of Indonesia's foreign policy is free and active politics. The policies implemented are confrontational and conflict is unavoidable. Actions taken by Indonesia led to its readiness to form alliances such as the non-aligned and nefos movements with the aim of fighting imperialism and colonialism. Even so, Indonesia was increasingly isolated from international relations, especially when it decided to leave the membership of the United Nations.*

**Keyword:** *Confrontational Policies; Realism; Axis Politics*

**Abstrak.** *Penelitian ini mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan politik luar negeri Indonesia saat itu bersifat konfrontatif. Artikel ini bertujuan menganalisis apakah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan faktor penggunaan power dalam melakukan hubungan Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan realisme. Sumber data yang digunakan berupa buku teori realism dalam hubungan Internasional, dokumen departemen luar negeri Indonesia dan artikel serta jurnal terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bersifat konfrontatif dan konflik tidak dapat dihindarkan. Tindakan yang dilakukan Indonesia menimbulkan ketersediaanya untuk membentuk aliansi seperti gerakan non-blok maupun nefos dengan tujuan melawan imperialism dan kolonialisme. Meskipun demikian, Indonesia semakin dikucilkan dari hubungan Internasional apalagi ketika memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Konfrontatif; Realism; Politik Poros



Copyright © 2023 The Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license.

[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### PENDAHULUAN

Pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara superpower di dunia (Sandy Dwi Ariyantoro & Corry Liana, 161). Walaupun sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia menjadi trigger negara-negara lain untuk membuat sebuah aliansi baru yang disebut gerakan non-blok dengan tujuan menghindari politik memihak yang saat itu cenderung terdapat dua blok besar yaitu blok barat dan blok timur. Fenomena ini banyak telah diteliti dengan berbagai sudut pandang baik politik, ekonomi maupun budaya. Apalagi terkait dalam bidang hubungan Internasional, dimana lahirnya blok-blok besar saat itu bukanlah tanpa adanya gesekan-gesekan berupa kepentingan masing-masing negara.

Perhatian dunia terhadap Indonesia tidak terlepas dari peran presiden Soekarno yang saat itu menjadi presiden pertama Indonesia (Setia Budhi Wilardjo, 2012: 2). Dalam kepemimpinannya, Soekarno menjalin hubungan dengan baik terhadap setiap negara-negara yang ada dalam politik Internasional demi menyokong terkait kepentingan nasional (Gili Argenti dan Dini Sri Istiningdias, 2017). Hal itu perlu dilakukan dikarenakan saat itu Indonesia sedang membutuhkan bantuan baik untuk ekonomi dalam negeri, kekuatan militer, hingga pengakuan dunia Internasional. Apalagi Indonesia melalui Soekarno selalu lantang menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme barat.

Indonesia yang menjadi negara dengan gaungnya melawan imperialisme dan kolonialisme barat tentunya akan menimbulkan sebuah konflik. Sehingga membuat Indonesia membuat poros baru yang dinamakan gerakan nefos, dimana Indonesia sebagai pemimpinnya. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reaksioner dan konfrontatif dilakukan oleh Indonesia dalam melawan nekolim. Sebut saja konfrontasi Irian Barat hingga konfrontasi Malaysia dengan tujuan membebaskan dari pengaruh nekolim. Indonesia mencoba dengan cara diplomasi hingga menggunakan kekuatan militer. Dari kebijakan-kebijakan konfrontasi ini memberikan perhatian dunia. Dua kekuatan superpower dunia saat itu semisal Uni Soviet dan Amerika Serikat terlibat membantu Indonesia. Walaupun begitu, Indonesia terkucilkan dalam dunia Internasional setelah memutuskan untuk keluar dari PBB.

### **Teori Realisme**

Secara teori, melalui sudut pandang teori realisme penulis mencoba membahas mengenai arah dan kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin serta bagaimana menggalang aliansi dalam melakukan politik Internasional. Teori realisme telah menggeser teori idealisme dalam studi hubungan Internasional dalam kurun waktu 1919-1930 an (Burchill et al. 2005). Kaum realisme merunut bahwa kehadiran realisme sudah ada sejak dunia kuno, dimana pola perilaku manusia kembali terulang di dunia modern saat ini. Hal itu merupakan cerminan realitas dunia dan lebih efektif dalam menilai perubahan dalam politik Internasional (Takdir Ali Mukti, 2017). Realisme hadir tidak hanya menawarkan pemikiran-pemikiran berupa teori politik Internasional, tetapi ketentuan politik Internasional dalam keadaan perang saat itu (Vinsensio Dugis, 2016: 35).

Terdapat beberapa perspektif politik Internasional oleh beberapa penganut realisme. Morgenthau mendefinisikan politik Internasional adalah perjuangan terhadap kekuasaan, dan setiap negara mendefinisikan kepentingan nasional di atas batas-batas power mereka. Balance of power juga merupakan posisi sentral dan penting dalam politik Internasional (Morgenthau, 1948:43). Serta politik menjadi wilayah yang bersifat berbeda dan memiliki otoritas. Sedangkan Organski berpendapat bahwa sistem Internasional itu bersifat hierarki. Terbagi menjadi empat bagian diantaranya dominant power, great powers, middle-powers dan small-powers (Organski, 1968: 254).

Terkait hubungan Internasional, kaum realisme memiliki pendapat bahwa politik Internasional bersifat anarki, dimana negara menjadi aktor utama dan rasional dengan tujuan memperoleh kekuasaan (struggle for power) (Jackson, R dan Sorensen, G., 1999: 68). Kekuasaan dijadikan usaha dalam memperoleh keamanan nasional, kestabilan dan ketertiban Internasional. Semua ketercapaian itu akan menjadi sebuah kenyataan dimana negara memiliki power (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1999:64). Pengertian power dapat diartikan sebagai kekuatan militer yang dimiliki oleh negara. Selain itu negara memiliki kekuatan laten yang disebutkan sebagai kekuatan sosial ekonomi berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi maupun teknologi.

Sedangkan menurut Thucydides, dalam bukunya History of the Peloponnesian War, percaya bahwa individu adalah aktor yang rasional ketika mereka membuat keputusan, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka dan menganalisis apakah mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dia juga berpendapat bahwa para pemangku kepentingan negara bertindak terutama berdasarkan kepentingan nasional negara dan bukan hal lain (Viotti dan Kauppi, 1999: 10). Niccolo Machiavelli, dalam karyanya The Prince (1515), mengatakan

bahwa seorang pemimpin bangsa harus menjaga kekuatan dan keamanan negara yang dipimpinnya (Skinner & Price 1988: 57).

Dari beberapa pendapat diatas tentunya akan menemukan sebuah teori realism dalam memaknai politik Internasional yang senantiasa memaknai sebuah negara dalam hubungan Internasional. Negara dalam hubungan Internasional sebagai aktor utama. Tingkah laku negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional secara rasional berpedoman pada kepentingan nasional, terutama kepentingan kelangsungan hidup dan keamanan. Untuk mengatasi kepentingan ini negara menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Kekuasaan adalah tujuan akhir dari tujuan itu sendiri. Dalam hubungan antar negara, kekuasaan sangatlah penting dan negara bertindak dalam kaitannya dengan kekuasaan, tindakan semacam itu bersifat "politis".

Selanjutnya, keinginan untuk tampil maksimal adalah keinginan umum. Dalam persaingan antar negara, sumber daya yang langka dan kurangnya arbiter yang netral menyebabkan persaingan kekuasaan antar pemerintah yang terjadi. Maka sistem internasional bersifat anarkis dan oleh karena itu perdamaian dan stabilitas internasional dapat dibangun ketika ada perimbangan kekuatan. Selain itu individu memiliki peran penting dalam membuat keputusan dan arah negara dalam melakukan hubungan Internasional dengan berbicara atas nama negara.

Indonesia melakukan kebijakan politik luar negeri konfrontatif yang menekankan power di dalam aktivitas hubungan Internasionalnya. Kebijakan itu pula tidak terlepas dari peran individu yang memiliki otoritas dalam membawa nama negara dalam setiap keputusannya. Sehingga teori realism menjadi teori yang akan menjabarkan bagaimana Indonesia dapat melakukan kebijakan politik luar negeri yang konfrontatif dibawah kendali presiden Soekarno.

## **METODE**

Dalam penggunaan pendekatan realisme, penelitian ini menggunakan penelitian library research, dimana negara menjadi aktor utamanya. Library Research merupakan sebuah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca, menulis, dan mengolah bahan yang ditemukan tanpa melakukan penelitian lapangan (Zed Mestika, 2004: 3). Peneliti menggunakan buku-buku tentang teori hubungan Internasional terutama teori realism dan dokumen serta jurnal penelitian terdahulu terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959-1965 meliputi Arah dan implementasi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang bersifat konfrontatif, serta analisis teori politik luar negeri Indonesia yang condong kepada realisme dan dampaknya.

### **Arah Politik Luar Negeri Indonesia**

Indonesia juga dengan gigih memperjuangkan nilai-nilai anti imperialis dan anti kolonialisme di era demokrasi terpimpin (Bunnell, 1966:37), menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak pasif dalam urusan dunia Internasional. Dalam upaya tersebut arah politik luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Presiden Sukarno sebagai pelopor Nefos dan sebagai pemimpin dalam perjuangan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sepenuhnya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Moh Hatta melalui pidatonya di forum Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa Indonesia berhak menjadi subjek dalam politik Internasional yang menentukan sikapnya sendiri, memperjuangkan tujuannya hingga merdeka seluruhnya (Peter Kasenda, 2014: 177).

Sangat jelas bahwa arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tercermin dalam tujuan negara yang ingin terbebas dari penjajahan secara utuh, sehingga dapat menjalankan kebijakan-kebijakan revolusioner untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dipilih adalah bebas aktif yang saat itu dikemukakan oleh Syahrir di pada saat Inter Asia Relations Conference di New Delhi pada tahun 1947 (Deplu, 1996: 388).

Politik bebas aktif memberikan posisi Indonesia bebas dalam mencari bentuk yang sesuai dan tidak terjebak dalam sistem yang tidak cocok serta tidak berlawanan dengan tujuan Indonesia (Deplu, 1996:388). Soekarno juga menyampaikan bahwa politik bebas aktif tidak hanya sebagai politik cuci tangan, politik defense ataupun apologetis (Agus Haryanto, 2014:24). Kebijakan politik bebas aktif ini buktinya mendukung Indonesia melakukan kebijakan yang bersifat konfrontatif selama demokrasi terpimpin dengan menghimpun kekuatan sekutu untuk dapat membantu menghadapi negara-negara imperialisme dan kolonialisme.

Eksistensi Indonesia sebagai negara dapat dilihat dari setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Soekarno, terutama Indonesia menjadi pelopor didirikannya blok Nefos dengan tujuan memerangi negara-negara yang termasuk dalam Oldefos. Tujuannya dapat menciptakan perdamaian dunia yang jauh dari imperialisme dan kolonialisme. Sehingga perjuangan Indonesia lakukan dengan dua cara: diplomasi dan agresi militer, khususnya dalam menghadapi isu-isu seperti pembebasan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, dan mengumpulkan teman dalam menghadapi Oldefos.

### **Konfrontasi Irian Barat**

Dalam teori realism terkait permasalahan Irian Barat lebih mengarah kepada diplomasi ofensif dimana keamanan negara menjadi prioritas yang lebih besar karena ada unsur negara lain yang mengancam sehingga negara memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah negara lain bertindak agresif (Vinsensio Dugis, 2016: 90). Diplomasi ofensif dilakukan dengan tujuan menghapuskan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengaruh imperialisme dan kolonialisme dari Belanda.

Permasalahan Irian Barat kembali mencuat kepermukaan di masa demokrasi terpimpin. Dimana hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949 menyatakan dan menyepakati bahwa status Irian Barat akan dibahas setahun kemudian (Budiman, 2014). Indonesia mencoba melakukan perjuangan baik secara diplomasi maupun politik agar Belanda dapat menyerahkan status Irian Barat. Dilakukanlah pertemuan-pertemuan bilateral antar kedua negara seperti Konferensi Uni Indonesia Belanda di Jakarta pada bulan Maret tahun 1950 maupun Konferensi Khusus di Hague-Belanda, bulan Desember tahun 1950 (Korwa, 2013). Tetapi dari dua hasil pertemuan tersebut tidak menemui hasil yang menyelesaikan persoalan.

Indonesia mencoba memasukkan masalah Irian Barat pada Sidang Majelis Umum PBB, dengan hasil resolusinya yaitu 41 suara mendukung dan 29 menolak Indonesia. Sedangkan 11 suara abstain termasuk Amerika Serikat. Dari hasil tersebut tidak dapat memberikan jalan terbaik untuk Indonesia karena tidak mencapai 2/3 suara mayoritas suara dalam PBB (Budiman, 2014). Sehingga setelah itu Indonesia tidak pernah lagi memasukkan agenda terkait permasalahan Irian Barat di Sidang Majelis Umum PBB.

Ketika jalan diplomasi yang sudah ditempuh tidak menemui kata kesepakatan, Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan peningkatan ancaman melalui kekuatan politik, ekonomi dan militer. Kebijakan konfrontasi yang diambil pemerintah, menurut Ganewati Wuryandari (2018), peningkatan itu perlu dilakukan untuk dapat menekan Belanda menyerahkan Irian Barat dengan segera. Hal tersebut dijelaskan dalam

pidato yang dikemukakan oleh menteri luar negeri Indonesia, dr. Subandrio pada Majelis Umum PBB, 9 Oktober 1961.

Kekuatan nasional berupa kekuatan ancaman menjadi hasil dari proses diplomasi yang tidak menghasilkan penyelesaian (Roy, 1995). Penggunaan kekuatan nasional menjadi legal standing Indonesia dalam melawan Belanda untuk status Irian Barat dengan kekuatan militernya. Dari pengerahan kekuatan militer inilah yang membuat hubungan semakin dekat antara Indonesia dengan Uni Soviet dimana diberikan bantuan berupa persenjataan. Persenjataan itu didapatkan Indonesia dengan membelinya (Susetyo, 2018). Selain itu dalam kunjungan Soekarno di Uni Soviet tahun 1956, Perdana Menteri Krushev menjanjikan bantuan berupa US\$250 Juta ke Indonesia. Bantuan tersebut bertambah sebanyak US\$100 Juta ketika PM Krushev berkunjung ke Indonesia tahun 1960. Tak hanya itu, Indonesia dan Uni Soviet sepakat terkait pinjaman lunak yang diberikan ke Indonesia sebesar US\$450 Juta untuk peralatan perang seperti tank, roket, dan pesawat jet bom (Wuryandari, 2018).

Kekuatan ancaman yang dilakukan Indonesia berupa pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh buruh. Setelah itu setiap perusahaan dinasionalisasikan dan diberikan ke pemerintah (Poeponegoro, 2008). Soekarno melalui pidatonya di acara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-15 tahun, 17 Agustus 1960 secara tegas menyampaikan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan kerajaan Belanda berakhir (Budiman, 2014). Langkah-langkah itu dilakukan oleh Indonesia untuk memaksa Belanda dari segi ekonomi dan politik.

Belanda berusaha membuat kebijakan untuk dapat mendirikan Irian Barat sebagai negara baru yang terpisah dari wilayah Indonesia (Susetyo, 2018). Belanda menyampaikannya dalam forum PBB bahwa akan mensahkan Rencana Undang-Undang (RUU) Dewan Papua beserta bendera dan lagu kebangsaan. Hal ini bertentangan dengan adanya piagam kedaulatan Indonesia (Setyawan, 2011). Kebijakan yang dilakukan Belanda membuat Soekarno mengeluarkan kebijakannya yang dikenal Tri Komando Rakyat (Trikorra) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta untuk merebut Irian Barat (Korwa, 2013). Hal ini merupakan konfrontasi militer Indonesia secara terbuka terhadap Belanda.

Adapun isi dari Trikorra ialah 1) gagalkan negara boneka Papua, 2) kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua, dan 3) siapkan diri untuk mobilisasi umum (Prinada, 2021). Setelah dinyatakannya Trikorra, pemerintah membentuk Komando Mandala Persiapan Irian Barat untuk dapat mengerahkan kekuatan militer dengan melalui beberapa operasi militer dalam merebut Irian Barat dari Belanda (Syarifuddin, 2017). Menurut Rycho Korwa (2013), Trikorra menjadi alat dalam meluncurkan serangan-serangan militer yang sifatnya terbatas kepada Belanda di akhir tahun 1961.

Baku tembak dari kedua negara baik Indonesia maupun Belanda salah satunya terjadi di laut aru (Budiman, 2014) dan menjadi bukti keseriusan Indonesia mengenai Irian Barat. Dalam perjuangan itu dikenal dengan sebutan Insiden Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso beserta tenggelamnya kapal perang Indonesia pada 15 Januari 1962 (Wuryandari, 2018). Aksi-aksi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai bukti keseriusan di atas memberikan perhatian dunia, diantaranya Amerika Serikat. Dari awalnya abstein menjadi terlibat secara aktif dalam penyelesaian Irian Barat antara Indonesia-Belanda. Keterlibatan Amerika Serikat merupakan reaksi yang terjadi karena kedekatan Indonesia dan Uni Soviet yang saat itu masuk dalam golongan Blok Timur sedangkan Amerika Serikat masuk blok Barat (Korwa, 2013).

Seorang diplomat Amerika Serikat, Elsworth Bunker diberikan perintah oleh Sekjend PBB untuk dapat menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat (Wisnumurti, 1998) dengan jalan diplomasi tertutup (Roy, 1995). Rencana yang diusulkan Elsworth Bunker terkait penyelesaian Irian Barat dikenal dengan nama Rencana Bunker (Budiman, 2014). Rencana Bunker berisikan dua poin penting diantaranya, 1) Belanda menyerahkan Irian Barat melalui Badan Sementara PBB, yaitu UNTEA (Wisnumurti, 1998), 2) Akan diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat yang dilakukan pemilihan (act of free choice) (Kartodirjo, 1984).

Isi rencana tersebut diterima kedua negara baik Indonesia maupun Belanda dengan bukti persetujuan yang di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962. Kesepakatan itu kemudian dikenal dengan Persetujuan New York (Susetyo, 2018). Kemudian menurut Agus Budiman (2014) disebutkan bahwa Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada UNTEA pada tanggal 1 Oktober tahun 1962. Setelah itu PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963.

Dalam pandangan realisme penggunaan power dalam kekuatan nasional telah dilakukan oleh Indonesia, berupa perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dengan bantuan buruh hingga kekuatan militer berupa trikora yang diinstruksikan dan dibentuk Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan. Dan hasil yang didapatkan oleh Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Irian Barat, memberikan bukti keunggulan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Seperti yang diungkapkan Ide Anak Gde Agung (dalam Ganeyawati Wuryandari, 2018) mengatakan bahwa kemenangan besar politik dan diplomatik adalah babak baru dari tindakan diplomasi yang cermat, terampil dan didukung dengan kekuatan bersenjata militer hingga demonstrasi rakyat Irian Barat untuk merdeka dari Belanda.

### **Konfrontasi Malaysia**

Selain adanya permasalahan terkait pembebasan Irian Barat, Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan lain, seperti konfrontasi yang dilakukannya terhadap Malaysia. Konfrontasi yang dilakukan merupakan kebijakan Soekarno untuk dapat secara konsisten melawan neo-kolonialisme dan imperialisme (Wuryandari, 2018). Menurut Harun (2015), presiden Soekarno marah dengan Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman yang mendeklarasikan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 kepada PBB dengan merilis hasil pendapat dari masyarakat Sarawak dan Sabah.

Pada tanggal 27 Juli 1963, Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan protesnya terhadap pembentukan Federasi Malaysia dengan sebutan Ganyang Malaysia (Harun dkk, 2015). Untuk dapat melihat sejauh mana hal tersebut terjadi tentunya tak terlepas dari peran Inggris di Malaysia. Inggris telah memberikan kemerdekaan kepada Malaysia tahun 1957 tetapi Inggris masih ikut campur dalam menentukan masa depan Singapura dan wilayahnya di Kalimantan seperti Serawak, Sabah dan Brunei. Pada bulan Mei tahun 1961, PM Malaya Tunku Abdul Rahman mengusulkan Federasi Malaysia yang terdiri dari wilayah kawasan Malaya, Singapura dan Kalimantan. Indonesia tidak keberatan dengan kebijakan tersebut.

Dalam perkembangannya, Brunei menyatakan untuk tidak bergabung di dalam Federasi. Di samping itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh ketua partai Rakyat, A.M. Azhari pada bulan Desember tahun 1962. Tujuan pemberontakan yang dilakukan ialah menciptakan sebuah negara merdeka diantaranya meliputi tiga wilayah Kalimantan (Brunei, Sabah dan Sarawak) yang disebut Kalimantan Utara. Peristiwa yang terjadi membuat perubahan terhadap kebijakan Indonesia melihat pembentukan Federasi Malaysia (Budiawan, 2017). Pada Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, dr.

Subandrio menyampaikan bahwa Federasi Malaysia didirikan tanpa adanya persetujuan rakyat dan menyatakan konfrontasinya secara resmi (Chairudin Nur dan Ravico, 2021).

Indonesia percaya Federasi Malaysia adalah negara boneka Inggris. Presiden Soekarno melihat bahwa Federasi Malaysia oleh Inggris digunakan untuk upaya memperluas neo-kolonialisme dan neo-imperialisme di Asia Tenggara (Sinarto, 2020). Oleh karena itu sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia (Wuryandari, 2018). Filipina coba menginisiasi pertemuan untuk dapat menyelesaikan persoalan Malaysia di konferensi tingkat wakil-wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) di Manila serta beberapa pertemuan setelahnya yang menghasilkan kesimpulan terkait masalah-masalah yang ditimbulkan akibat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Tetapi kesepakatan itu rusak akibat PM Tunku Abdul Rahman menandatangani dokumen terkait pembentukan negara Federasi Malaysia pada tanggal 9 Juni 1963 (Budiman, 2014). Kegagalan yang diterima membuat Indonesia melakukan secara penuh konfrontasinya terhadap Malaysia (Wuryandari, 2018).

Peningkatan konfrontasi yang dilakukan Indonesia salah satunya dengan operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora) untuk melakukan penyerangan ke wilayah Malaysia. Harapannya berhasil seperti operasi Trikora (Budhiawan, 2017). Dwikora sendiri berisikan bahwa untuk menguatkan pertahanan Indonesia dan membantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei dengan tujuan membubarkan berdirinya Federasi Malaysia (Sinarto, 2020). Dwikora dipandang Soekarno sebagai retorika yang diciptakan terkait musuh bersama dengan memobilisasi massa Indonesia melawan Malaysia.

Saat itu permasalahan ini harusnya dapat diselesaikan oleh PBB selaku arbitrase Internasional tetapi dalam kenyataannya dianggap sebagai lembaga yang tidak netral oleh Indonesia. Seperti yang Soekarno sampaikan dalam pidatonya, 31 Desember 1964, "Jika PBB yang menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang!". Karena tidak ada perubahan terjadi dan Malaysia menjadi anggota dewan keamanan di PBB (Naufal Shidqi Laras, 2019), secara resmi Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 (M. F. Mukhti, 2012).

Dampak kebijakan konfrontasi Soekarno sangatlah merugikan Indonesia. Apalagi dalam segi perekonomian saat itu yang cenderung mengalami inflasi. Seperti yang disebutkan oleh Heru Sutrisno (2013), pengeluaran Indonesia sangatlah besar dengan adanya kebijakan konfrontasi dimana terjadi kenaikan inflasi sebesar 650% pada tahun 1965. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin menjadi salah satu saksi dimana Soekarno lebih mementikan keinginannya untuk melawan neokolim daripada mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia saat itu. Diperkuat dengan yang disampaikan oleh Benedictus Peter Sinarto (2020), melalui statement Soekarno berikut ini:

"Kalau kita lapar, itu wajar. Kalau kita malu, itu juga normal. Namun, jika kita lapar atau malu karena Malaysia itu kurang ajar.. Ingatlah diseluruh pelosok negeri bahwa kita bersatu untuk melawan penghinaan ini!"

Mengutamakan terkait pembangunan bidang ekonomi bukanlah sesuatu yang membutuhkan bakat politik Soekarno. Ketika Indonesia memilih fokus terhadap permasalahan ekonomi itu sama saja akan menyebabkan ketergantungan ekonomi

kepada negara-negara yang masuk dalam Oldefos. Sedangkan hal itu sangat bertentangan dengan keinginan Soekarno (Leifer, 1983). Menurut Soekarno, pemberantasan terhadap pengaruh-pengaruh asing dalam hal politik, ekonomi maupun budaya merupakan yang terpenting dibandingkan pertumbuhan ekonomi domestik (Bunnell, 1966). Sehingga tak heran jika Soekarno lebih memilih melawan neokolim daripada pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan terkait ekonomi yang diambil pemerintahan Soekarno pun mengabaikan kaidah-kaidah ekonomi (Sutrisno, 2013).

Kebijakan konfrontasi politik yang dilakukan Soekarno terhadap Malaysia berakhir di tahun 1966. Berakhirnya kebijakan tersebut tidak dapat diabaikan dengan peran terjadinya peristiwa besar tahun 1965 yaitu Gerakan 30 September dan keruntuhan rezim Soekarno (Budiawan, 2017). Masa konfrontasi dengan Malaysia diselesaikan dengan serangkaian jalur diplomasi antara keduanya seperti konferensi perumusan resolusi konflik di Bangkok pada 28 Mei 1966 dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian damai. Perjanjian damai dilaksanakan pada 11 Agustus 1966 (Indrayani dkk, 2020).

Penggunaan power dalam peristiwa konfrontasi dengan Malaysia digunakan oleh Indonesia dikarenakan Malaysia mengancam keamanan negara dengan proyek neo kolonialisme dan neo imperialisme. Dimana Indonesia menyaksikan sebagian besar masyarakat Malaysia tidak setuju dengan proyek tersebut. Kecenderungan inilah yang membuat Indonesia melakukan konfrontasinya melalui jalur militer dengan pasukan dwikora, dan tidak adanya arbitrase Internasional yang dapat mendamaikan, dimana malah merugikan Indonesia dengan masuknya Malaysia di PBB sehingga saat itu Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB. Dan sama halnya paham realisme memandang kebijakan ekonomi tidak terlalu penting sejalan dari apa yang menjadi kebijakan politik luar negeri Indonesia.

### **Politik Poros-Porosan Indonesia**

Kekuatan negara di dunia pada saat itu terbagi menjadi dua persekutuan besar. Dimana blok timur dengan Uni Soviet menjadi pemimpinnya dan blok barat dengan Amerika Serikat menjadi pemimpinnya (Ariwianto, 2017). Dalam melihat realitas tersebut, Indonesia menciptakan balance of power karena tidak ada satu pun negara yang menjadi kekuatan Internasional dan menyatukan negara-negara di dunia dibawah pemerintahannya secara langsung (Takdir Ali Mukti, 2017). Oleh karena itu realisme memandang pentingnya adanya aliansi untuk setiap negara dalam memastikan kelangsungan hidupnya. Seperti yang dilakukan Indonesia dengan menempatkan untuk mendirikan poros baru yang dinamakan Gerakan Non Blok. Tetapi gerakan ini dipandang sangat utopis karena sulit bagi setiap negara untuk tidak memihak terutama jika terjadi perang secara terbuka (Soenarko, 1992). Politik luar negeri Indonesia yang bersifat konfrontatif tentunya akan melahirkan keberpihakan-keberpihakan khusus dalam pengimplementasiannya.

Dalam sikap konfrontasinya, Indonesia sangat menekan keras terhadap kebijakan neo-kolonialisme dan neo imperialisme. Dibuktikan dengan adanya kebijakan konfrontatif anti barat dalam peristiwa Irian Barat dan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan doktrin barunya berupa dunia terbagi menjadi dua blok, Oldefos (Old Established Forces) dan Nefos (New Emerging Forces) (Budiman, 2014). Ketegangan yang ada di dunia terjadi karena pertentangan Oldefos yang menurut Soekarno kekuatan-kekuatan orde lama atau negara-negara adidaya dan Nefos yang diartikan sebagai negara-negara progresif (Sholehuddin dan Kasdi, 2015). Oldefos membawa doktrin neokolim. Sedangkan Nefos menjadi penentang akan doktrin yang dijalankan oleh Oldefos.



Adanya doktrin mengenai Oldefos dan Nefos diperkenalkan pertama kali di KTT Non-Blok, Baghdad, tahun 1961. Saat itu Soekarno menyampaikan pidatonya, "Membangun Dunia Kembali". Tetapi kurang mendapat respon baik kepada setiap anggota konferensi. Indonesia juga berusaha mengajak anggota Non-Blok untuk membuat PBB tandingan yang diberinama Conference Of The New Emerginging (CONEFO). Hal itu didasari karena ketidakpuasan Indonesia terkait permasalahan Malaysia (Budiman, 2014). Tawaran Indonesia berupa ide tersebut ditolak kebanyakan dari anggota Non-Blok dengan alasan tidak sesuai dengan cita-cita gerakan Non-Blok itu dibentuk.

Dilain sisi, Soekarno menjalankan politik mercusuaranya untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menerangi jalan negara-negara yang masuk dalam Nefos. Penguatan itu diimplementasikan dalam bentuk pembentukan poros Jakarta-Pnom Penh-Beijing-Pyong Yang membuat Indonesia mendekat dengan negara-negara kiri seperti Kamboja, Republik Rakyat Cina (RRC), dan Korea Utara (Atmadja, 1994). Faktor dibentuknya poros ini dikarenakan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang membutuhkan pemasok logistik dan militer Indonesia. Selain itu Malaysia memiliki kedekatan dengan Inggris sehingga Indonesia mencari rekan negara besar yang bukan sekutu Inggris untuk dapat mendukung kebijakan konfrontasinya. Negara besar yang dipilih salah satunya Cina dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut cenderung dengan mudah memberikan bantuan terkait dana tanpa persyaratan yang sulit.

Kedekatan ini sebenarnya telah menyimpang dengan adanya politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Menurut Sholehuddin dan Kasdi (2015) keberpihakan Indonesia mengakibatkan ruang gerak Indonesia dalam diplomasi pada forum Internasional semakin sempit. Harusnya dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, perumus dan pelaksananya yakni Presiden harus bertanggungjawab terhadap tidak adanya jurang pemisah antara retorika yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan berupa implementasinya (Atmadja, 1994). Hal ini sangat berbeda politik luar negeri Indonesia di masa demokrasi terpimpin yang cenderung memihak salah satu kekuatan besar di dunia saat itu.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sangat menekankan aspek anti imperialism dan kolonialisme dalam hal arah politik luar negerinya. Hal itu dapat dilihat dari setiap kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan sangat agresif dan bersifat konfrontatif. Penggunaan segala aspek kedekatan mulai dari diplomasi, kekuatan militer dan politik aliansi dilakukan oleh Indonesia dalam memperjuangkan arah politik luar negerinya.

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin sangat berkaitan dengan konsep teori realism dalam hubungan Internasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif dibuktikan dengan beberapa konfrontasi yang terjadi baik dengan Belanda maupun Malaysia demi keamanan nasional. Penggunaan power dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dengan dibentuknya dwikora, trikora maupun pembentukan aliansi baru yakni Gerakan Non-Blok dan Nefos diantara dua aliansi besar saat itu. Dampak realism dalam politik luar negeri Indonesia tentunya mendapat perhatian dunia Internasional dimana menjadi pelopor didirikannya gerakan non-Blok dan Nefos.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariwianto, E. (2017). Hubungan Perdagangan & Ekonomi Negara Blok Timur Pasca Keruntuhan Uni Soviet. *Kronik*, 1(2):43-48.
- Atmadja, M. K. (1994). *Politik Luar Negeri Indonesia: Suatu Evaluasi*. Analisis CSIS.
- Budiawan. (2017). How do Indonesians remember Konfrontasi? Indonesia–Malaysia relations and the popular memory of “Confrontation” after the fall of Suharto. *Inter-Asia Cultural Studies*, 18(3): 364-375.
- Budiman, A. (2014). Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965. *Cakrawala*, 5(2): 149-157.
- Bunnell, F. P. (1966). Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation. *Indonesia*, (2): 37-76.
- Burchill, S., & Linklater, A. (1996). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (1996). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Buku III Periode 1960-1965*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Harun, A., Razak, M. R. A., Ali, A., Nasir, M. N. F., & Radzuan, L. E. M. (2015). Anthropomorphism in Political Cartoon: Case Study of the 1965 Malaysia-Indonesia Confrontation. In *International Colloquium of Art and Design Education Research (i-CADER 2014)* (pp. 53-60). Springer, Singapore.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(2): 17-27.
- Indrayani, I., Umar, H., dan August M. (2020). Indonesia’s Foreign Policy During Soekarno era 1945-1965 (Orientation Shift from Diplomacy to Confrontation). *Journal of Social Political Science*, 1(3), 218-231.
- Jackson, R & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kasenda, P. (2014). *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Korwa, R. (2013). Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam NKRI. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1).
- Laras, N. S. (2019, June 19). *Malaysia, Indonesia, dan PBB Tahun 1964-1965*. Kompasiana. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/malaysia-indonesia-dan-perserikatan-bangsa-bangsa-tahun-1964-1965?page=all>
- Leifer, M. (1983). *Indonesia’s Foreign Policy*. London: Allen & Unwin.
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfre A. Knopf.
- Mukti, M. F. (2012, May 25). *Sukarno Tantang PBB. Historia*. Retrieved from <https://historia.id/politik/articles/sukarno-tantang-pbb-Py02v/page/1>
- Mukti, T. A. (2017). *Dasar-Dasar Kajian Hubungan Internasional Edisi Terjemahan*. England: British Library.

- Nur, C. dan Ravico. (2021). Ganyang Malaysia: Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966. *Danadyaksa Historica*, 1(1), 25-33.
- Organski, A. F. K. (1968). *World Politic Edition 2th*. University of California: Knopf.
- Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinada, Y. (2021, December 17). *Sejarah Operasi Trikora: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh*. Tirto. Retrieved from <https://tirto.id/gaV7>
- Roy, S. L. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schulte Nordholt, H. (2011). Indonesia in the 1950s: Nation, Modernity, and the Post-Colonial State, Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde. *Journal of the Humanties and Social Sciences of Southeast Asia*, 167 (4), 386-404.
- Setyawan, A. A & Darlis, A. M. (2011). *Resimen Pelopor: Pasukan Elit yang Terlupakan*. Yogyakarta: Matapadi Presindo.
- Sholehuddin, A., dan Kasdi, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965. *Avatara*, 3(1).
- Sinarto, B. P. (2020). Memories of Konfrontasi and Anti-Malaysia Sentiment in Indonesia. *Jurnal Empirika*, 5(1), 69-82.
- Skinner, Q., & Price, R. (1988). *Machiavelli: The Prince*. Cambridge University Press.
- Soenarko, S. (1992). Gerakan Non-Blok: Relevansi dan Peran Indonesia di Masa Mendatang. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 4.
- Susetyo, B. (2018). *Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Pembebasan Irian Barat Tahun 1949-1962*.
- Sutrisno, H. (2013). Konfrontasi Indonesia – Malaysia Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia (1963-1966). *Avatara*, 1(3).
- Syarifuddin. (2017). *Buku Ajar Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Pasca Sarjana UNJ Press.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International Relation Theory Fifth Edition*. Pearson Education, Inc.
- Wisnumurti, N. (1998). Politik Luar Negeri Indonesia Bagi Terciptanya Perdamaian dan Keamanan Dunia Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 3(1).
- Wuryandari, G. dkk. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.